



**Judul** : Yuk, Budayakan Membaca Buku  
**Tanggal** : Kamis, 18 Januari 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Negara Bangun Banyak Gedung Perpustakaan **Yuk, Budayakan Membaca Buku**

SENAYAN mendorong gedung perpustakaan dengan segala prasarana di dalamnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perpustakaan Nasional mesti bisa menjadi pusat literasi masyarakat.

"Berbagai gedung perpustakaan dengan segala macam kelengkapannya, semua gedung-gedung yang dibiayai oleh negara, harus berujung pada kemanfaatan," tegas anggota Komisi X DPR Fahmy Nkydroes dalam rapat bersama Plt Kepala Perpustakaan E Aminuddin Azis di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Fahmy menegaskan, sebenarnya upaya pengembangan pembangunan literasi ini sudah bertumbuh panjang. Bahkan dilakukan oleh Presiden RI pertama, Soekarno, melalui kegiatan pemberantasan buta huruf.

Hal ini menunjukkan pembangunan literasi harus terus-menerus diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi gerakan semesta. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh stakeholder, sehingga Indonesia dari tahun ke tahun terus mengembangkan pembangunan literasi.

"Angkanya (indeks literasi) tidak kecil. Sebab di tempat kami saja, hanya tujuh ribu penduduk yang memanfaatkan perpustakaan. Ini pekerjaan rumah kita dalam konteks pembangunan literasi, masih sangat luar biasa banyak (pekerjaan rumahnya)," tambahnya.

Kendahnya budaya membaca buku di Indonesia terus menjadi masalah sejak dulu. Hal itu tergambar dari survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

PISA adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kembali mengingatkan lima rekomendasi Panja Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Pertama, Perpustakaan diminta meninjau kembali Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota terkait persyaratan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kota.

Pihaknya berpandangan, perlu kajian yang komprehensif mengenai bentuk layanan dan sarana prasarana perpustakaan di kota-kota padat penduduk yang tidak memiliki lahan cukup untuk pembangunan gedung perpustakaan.

Kedua, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Perpustakaan untuk menyelaraskan kebijakan standar perpustakaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan. Termasuk menjadikan kondisi sarana prasarana perpustakaan menjadi indikator penentu akreditasi sekolah.

Ketiga, mendesak Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) membuat perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dalam formulasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keempat, Komisi X DPR mendesak Pemerintah melalui Perpustakaan untuk mengevaluasi implementasi Surat Keputusan (SK) Perpustakaan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Asesor Daerah Akreditasi Perpustakaan.

Kelima, mendesak Pemerintah untuk merevitalisasi gerakan literasi melalui perubahan paradigma literasi inklusi sosial yaitu gerakan literasi sebagai praksis sosial pendorong transformasi sosial ekonomi.

Revitalisasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gerakan literasi yang masif dan berkesinambungan," katanya.

Sementara, Kepala Perpustakaan E Aminuddin Azis menuturkan, pihaknya terus memperkuat kecakapan literasi masyarakat dan mendukung program merdeka belajar dan kampus merdeka.

Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi Panja Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR.

Dijelaskan Aminuddin, pertama, upaya peningkatan kecakapan literasi dilakukan melalui pemberdayaan perpustakaan sekolah. Kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di 600 desa. Ketiga, penyediaan bahan bacaan bermutu. Keempat, penguatan budaya baca dan literasi. Kelima, pelestarian dan pengarusutamaan naskah nusantara. Keenam, kajian perpustakaan berbasis web. ■ KAL